

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya (Kemenkes, 2018). Dengan jumlah angka stunting pada tahun 2021 di Indonesia mencapai 24,4% dan dengan keluarga berisiko stunting mencapai 21,9 juta, yang tersebar di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Ramayulis, dkk. (2018), menyatakan bahwa *stunting* atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi usia 0-11 bulan dan balita usia 12 – 59 bulan akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya. Di sebuah negara dengan kategori berkembang, malnutrisi pada pra-kehamilan dan ibu hamil bisa berdampak pada kelahiran anak dengan *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR) dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Hampir setengah dari IUGR terkait dengan status gizi ibu. Selain itu, faktor lain penyebab IUGR adalah kondisi ibu dengan hipertensi dalam kehamilan (Cesar, Linda, Caroline, Pedro, & Reyna, 2008).

Menurut Ramayulis et al (2018), nutrisi selama kehamilan dapat menentukan tumbuh kembang anak selama masih di masa janin dalam kandungan. Salah satu faktor risiko yang mempengaruhi kejadian *stunting* pada balita adalah riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Menurut keterangan dari Proverawati dan Ismawati (2010), bayi dengan BBLR akan tumbuh dan berkembang lebih

lambat karena bayi dengan BBLR sudah dapat mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin sejak lahir dan nantinya akan terus berlanjut sampai usia berikutnya, setelah lahir akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan bayi yang lahir normal dan seringkali gagal mengejar tingkat pertumbuhan yang seharusnya dicapai pada usia pascakelahiran. Bayi BBLR juga mengalami gangguan saluran cerna karena saluran cernanya belum berfungsi, seperti tidak mampu menyerap cairan lemak dan akan mencerna protein sehingga nantinya akan terjadi kekurangan di dalam cadangan zat gizi dalam tubuh. Akibatnya pertumbuhan bayi BBLR akan terganggu (Proverawati, A & Ismawati, C, 2010). Panjang lahir bayi akan berdampak pada pertumbuhan selanjutnya. Anugraheni & Kartasurya (2012), mengungkapkan bahwasannya telah menemukan bayi yang lahir dengan panjang lahir rendah memiliki risiko 2,8 kali mengalami *stunting* dibandingkan dengan bayi yang lahir normal panjang.

Kasus *stunting* masih menjadi masalah besar bagi sebagian negara di dunia. Pada tahun 2017 lebih dari setengah balita *stunting* di dunia berasal dari Asia (55%), sedangkan lebih dari sepertiganya (39%) tinggal di Afrika. Data prevalensi balita *stunting* yang dikumpulkan World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam urutan ke-3 dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2005- 2017 adalah 36,4% (WHO, 2018) .

Serupa dengan prevalensi pada *stunting* dalam skala nasional, Jawa Tengah memiliki prevelansi yang cukup besar, yaitu sekitar di atas 20%. Menurut Laporan Riskesdas dicantumkan bahwa prevalensi *stunting* anak usia 0 sampai 1 tahun pada

tahun 2018 di Jawa Tengah sebesar 32,1%. Angka tersebut lebih tinggi dari prevalensi *stunting* pada tahun 2017 sebesar 28,5% (Anggraeni & Handayani, 2021: 674). Sementara itu, pada tahun 2019 prevalensi *stunting* di Jawa Tengah menurun menjadi 27,68%. Namun, angka tersebut lebih tinggi 0,01% dari angka *stunting* nasional (Media Indonesia, 17 Juni 2021).

Menurut data pada kabupaten atau kota, program gizi Jawa Tengah pada tahun 2019 telah ada dua kabupaten yang memiliki nol kasus *stunting*, yaitu pada Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Grobogan. Sementara itu, daerah dengan kasus *stunting* tertinggi di Jawa Tengah terdapat pada Kabupaten Banjarnegara dengan prevalensi *stunting* menyentuh angka 23,7% dan disusul oleh kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah.

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang menjadi prioritas penanggulangan *stunting* adalah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2019, Kabupaten Pemalang tergolong dalam 14 (empat belas) zona merah kabupaten miskin di Jawa Tengah dengan menempati urutan ke-4 yaitu dengan jumlah penduduk miskin 200,7 ribu jiwa atau 15,41%, sedangkan data pada tahun 2018 menempatkan Kabupaten Pemalang di urutan ke-6. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Pemalang meningkat dan berkorelasi pada tingkat kesejahteraan di Kabupaten Pemalang (Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2019).

Persebaran balita penderita *stunting* di Kabupaten Pemalang meliputi 10 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Kabupaten Pemalang sendiri terdiri atas 14 kecamatan dan 7 kecamatan diantaranya memiliki angka *stunting* yang cukup tinggi

dibandingkan kecamatan yang lainnya. *Stunting* yang ada di Kabupaten Pemalang tersebar di 10 desa, antara lain: Kalirandu, Kebandungan, Longkayeng, Losari, Mandiraja, Parunggalih, Purana, Tambakrejo, Tumbal, dan Wangkelang. *Stunting* menjadi salah satu prioritas permasalahan di Kabupaten Pemalang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan sebagai langkah lanjutannya Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/9611/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang diharapkan memberikan kontribusi dalam menekan angka *stunting*. Terdapat 14 instansi pemerintah daerah yang terlibat di dalamnya dengan adanya pihak-pihak yang terlibat. Dikutip dari Kepala Dinas Kabupaten Pemalang (Suara Merdeka, 19 Maret 2019), menegaskan bahwa *stunting* sebagai persoalan kesehatan yang serius ditangani bersama-sama oleh semua pihak. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya kerja sama antar unsur-unsur lembaga atau dengan *collaborative governance*.

Apabila ditinjau dari Buku Rencana Aksi Daerah Penanganan *Stunting* Kabupaten Pemalang Tahun 2019, pembentukan tim ini lebih banyak melibatkan instansi pemerintah, dengan kata lain masih minimnya keterlibatan pihak luar seperti swasta. Idealnya dengan adanya keterlibatan pihak swasta akan mendorong kerja sama sehingga dapat mempercepat penurunan angka balita *stunting* karena peran swasta penting dalam hal ini yaitu sebagai aktor pendukung atas kebijakan pemerintah.

Stunting saat ini masih menjadi sebuah permasalahan serius yang harus diselesaikan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Survei Status Gizi Balita Indonesia atau bisa disingkat dengan SSGBI, prevalensi *stunting* yang ada di Indonesia pada tahun 2019 menyentuh angka 27,7%. Meski mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih berada di atas 20%. Sementara itu, batas angka yang direkomendasikan WHO harus dibawah 20% (Ruswati et al., 2021: 34-35).

Kondisi anak yang mengalami kasus *stunting* memperlihatkan kondisi fisik tinggi badan kurang dari tinggi badan anak seusianya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Selain gizi buruk yang diterima pada seribu Hari Pertama Kehidupan atau (HPK), faktor lainnya yang juga dapat nantinya mempengaruhi yakni masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran seorang ibu mengenai pola asuh dengan kategori yang baik serta asupan gizi yang cukup. Hal ini nantinya tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari anak yang terhambat. Keterbatasan akses masyarakat akan harapan hidup dan juga mengenai asupan-asupan pada pemenuhan pangan, sanitasi, ketersediaan air bersih, dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi faktor pendorong lainnya yang bisa menjadi sebuah penyebab *stunting* (Tentama et al., 2018: 114).

Pemerintah saat ini sudah berusaha dan juga berupaya untuk dapat menurunkan prevalensi *stunting* sehingga bisa mencapai angka 14% dengan perkiraan dapat turun hingga mencapai angka 2,7% per tahun. Target penurunan prevalensi *stunting* diterapkan dan juga ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2020-2024 (stunting.go.id,

diakses pada 10 Oktober 2022). Dampak dari bahayanya kasus *stunting* ini dapat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di sebuah negara, peningkatan angka kemiskinan, dan juga dapat membuat ketegangan sosial sehingga mendorong pemerintah untuk terus berkomitmen menghentikan *stunting*. Kualitas pada sumber daya manusia yang sudah menjadi prioritas pembangunan skala nasional karena dengan meningkatnya produktivitas akan berdampak pada pertumbuhan dan juga pemerataan ekonomi dengan komponen penting dalam kemajuan dan daya saing suatu negara.

Selama ini perhatian pemerintah dalam mengatasi sebuah permasalahan *stunting* sudah cukup memadai, terbukti dengan adanya berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah *stunting*. Kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, Peraturan Presiden dengan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, dan undang-undang lainnya yang dibuat untuk mendukung penanganan kasus *stunting*. Lain dari itu, masalah *stunting* adalah bagian dari prioritas pada program nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Collaborative governance lahir seiring dengan pergeseran paradigma dari *government* ke *governance*. Dalam konsep *governance*, pemerintah tidak perlu menyelesaikan masalah publik sendiri, tetapi dapat melibatkan partisipasi pihak lain atau lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik melalui kebijakan. Selain itu, karena saat ini semakin banyak tuntutan dan permasalahan yang semakin kompleks maka pemerintah juga perlu melibatkan

masyarakat dalam kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, *collaborative governance* hadir untuk meningkatkan kerja sama antar *stakeholder* yaitu sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta sebagai upaya dan respons pemerintah dalam menangani permasalahan publik. Pemikiran sektor publik (pemerintah) dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan akan menjadikan sektor publik lebih efektif dan efisien.

Dalam perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan *trend* baru yang menarik (Ansell dan Gash, 2008). Dalam kebijakan publik, bagian permasalahan kesehatan tersirat di beberapa regulasi pemerintah untuk melibatkan *stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) di Indonesia. Pemerintahan berpola *collaborative governance* terlihat semakin berkembang di berbagai daerah seiring dengan adanya agenda otonomi daerah. Pernyataan ini berdasarkan kenyataan program pencegahan *stunting* di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang mengikutsertakan beberapa *stakeholder* secara aktif dalam penanganan masalah kesehatan, khususnya di Kabupaten Banggai terutama dalam pencegahan *stunting*.

Kasus *stunting* saat ini adalah sebuah hal dalam kesehatan masyarakat yang banyak diperhatikan. Banyak pihak prihatin dengan adanya *stunting* sebab penyakit ini mengakibatkan menurunnya pertumbuhan yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Isu mengenai pencegahan *stunting* bagi masyarakat Indonesia semakin masif dilakukan sebab kasus *stunting* di Indonesia masih tinggi,

walaupun terus ada penurunan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2018, telah ditetapkan pada 100 kabupaten dan terdapat di 34 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai lokasi prioritas penurunan *stunting*. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah dengan mencapai 60 kabupaten pada tahun berikutnya. Telah banyak upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dalam atau luar negeri.

Upaya memerangi *stunting* tidak hanya menjadi komitmen Indonesia, namun juga menjadi salah satu komitmen global yang termuat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai penyempurna dari agenda pembangunan global sebelumnya dan ditargetkan dapat dituntaskan pada 2030 mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk *collaborative government* penanganan masalah *stunting* di Kabupaten Pematang?
2. Apa saja program pencegahan dan penanggulangan *stunting* dan bagaimana pelaksanaan program pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Pematang?
3. Bagaimana regulasi kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pematang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan kasus *stunting* di Kabupaten Pematang.

2. Mengetahui siapa saja yang terlibat dari pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pematang Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya kajian keilmuan yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanganan kasus *stunting* di Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya khususnya sebagai pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan kasus *stunting* melalui *collaborative governance*.

Selain bertujuan sebagai pertimbangan dan acuan dalam pencegahan dan penanggulangan oleh pemerintah, penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak swasta, dan *stakeholder* lain dalam mempercepat penanggulangan dan pencegahan *stunting* dengan model skenario *collaborative governance* di Kabupaten Pematang Jaya.

1.5 Kajian Pustaka (*Literature Review*)

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*, sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Putri & Nurcahyanto, 2021)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang	Penelitian ini menunjukkan keberhasilan dalam <i>collaborative governance</i> dengan menggunakan teori Ansell dan Gash yang tercapainya beberapa komponen dan ditunjukkan dengan adanya penurunan angka <i>stunting</i> melalui kegiatan kelas <i>stunting</i> yang diadakan setiap bulan di Balai Desa Kalirandu. Namun, ditemukan beberapa hambatan dalam proses kolaborasi seperti kurangnya komitmen dari kepala desa, keterbatasan SDM, dominasi dari sektor kesehatan, dan permasalahan dalam pengunggahan data. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/9665/1489
2.	(Sukanti & Faidati, 2021)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman	<i>Collaborative governance</i> yang dilakukan di Kabupaten Sleman sudah berjalan baik dengan tercapainya prinsip, seperti: keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Selain itu, ditunjukkan adanya penurunan angka <i>stunting</i> . Kegiatan kolaborasi yang dilakukan, yaitu: Getar Thala, Gambang Stunting, PANdu TEMan, dan Pecah Ranting. Namun, pada pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terdiri

			<p>dari SDM yang berkualitas, SDA yang mendukung dan anggaran. Sementara itu, faktor penghambat berupa kondisi lingkungan yang kurang sehat, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan pola didik orang tua yang dipengaruhi tingkat pekerjaan.</p> <p>https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30594</p>
3.	(Saufi, 2021)	<p>Dinamika <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan <i>Stunting</i> Ditengah Pandemi Covid-19</p>	<p>Pelaksanaan <i>collaborative governance</i> belum adanya komitmen dari pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga terdapat kesenjangan yang ditemukan pada adanya data yang menunjukkan peran yang dominan oleh pemerintah dan membutuhkan waktu yang lama pada transformasi kebijakan. Penanggulangan <i>stunting</i> pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan <i>collaborative governance</i>.</p> <p>Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan ...</p> <p>https://c</p>
4.	(Abdul Rachman Saida ,2022)	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Upaya Pencegahan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan tata kelola kolaboratif di dalam pencegahan kasus <i>stunting</i> di Kabupaten Banggai sangat baik dengan angka keterwakilan bisa mencapai angka sebesar (87,1%), dengan rincian untuk</p>

		<p><i>Stunting</i> Di Kabupaten Banggai</p>	<p>sub variabel struktur jaringan (<i>network structure</i>) dengan keterwakilan sebesar 92,07% (termasuk kategori sangat baik). Untuk sub variabel komitmen pada tujuan bersama (<i>commitment to goals</i>) dengan persentase 90,24% (termasuk kategori sangat baik), untuk sub variabel kepercayaan antar peserta (<i>trust</i>) dengan persentase 89,02% (termasuk kategori sangat baik), untuk subvariabel kepastian tata kelola dengan presentase 83,6% (termasuk kategori sangat baik), untuk subvariabel akses otoritas (<i>access to power</i>) dengan presentasi 85,3% (termasuk kategori sangat baik), untuk subvariabel akuntabilitas/distributif tanggung jawab (<i>sharing of responsibility</i>) dengan persentase sebesar 87,5% (termasuk kategori sangat baik), untuk subvariabel <i>information sharing</i> dengan presentase sebesar 87,1% (istilah kategori sangat baik), dan untuk sub variabel akses sumber daya (<i>access to resources</i>) dengan persentase sebesar 84,1% (termasuk kategori sangat baik). Artinya, berdasarkan penelitian tata kelola kolaboratif dalam pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Banggai secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik.</p> <p>http://jtsees.untika.ac.id/index.php/JTSEES</p>
--	--	---	--

5.	(Wiyono et al., 2021)	Peningkatan Kapasitas Lintas Organisasi Sosial, Kader, Karangtaruna, dan Tokoh Masyarakat Lain Untuk Penanganan <i>Stunting</i> Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Lokus <i>Stunting</i> Lenteng Agung Jagakarsa, Jakara Selatan 2021	Kegiatan seminar yang merupakan bentuk dari upaya kolaborasi dalam penanganan <i>stunting</i> menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dari kegiatan pelatihan dan melakukan tindak lanjut kegiatan dengan mendatangi rumah orang tua balita <i>stunting</i> untuk memberi edukasi. https://ejurnal.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/Pengmas/article/view/826
6.	(Rahayu, 2020)	<i>Collaborative Governance To</i>	Pada penelitian ini ditemukan masalah terkait pelaksanaan kolaborasi, yakni kurang adanya keterkaitan

		<p><i>Achieve Sdgs Social Development: Preventing Stunting Lesson From Pandeglang</i></p>	<p>antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam mencapai target sehingga pengukuran kinerja tim hanya dapat dilakukan oleh dinas kesehatan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan <i>stunting</i> melalui <i>collaborative governance</i> belum baik dan belum menunjukkan keberlanjutan serta dampak yang nyata.</p> <p>https://scholar.ui.ac.id/en/publications/collaborative-governance-to-achieve-sdgs-social-development-preve/fingerprints/</p>
7.	(Latifa Suhada Nisa,2018)	<p>Kebijakan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Indonesia (<i>Stunting Prevention Policies in Indonesia</i>)</p>	<p>Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan dan regulasi tentang penanggulangan <i>stunting</i> di Indonesia. Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi penanggulangan <i>stunting</i> yang diwujudkan dalam bentuk intervensi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan dengan memfokuskan pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sedangkan intervensi sensitif di antaranya dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Selain kesehatan, faktor sosial ekonomi juga diketahui berpengaruh terhadap <i>stunting</i>, seperti masalah</p>

			kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga. https://jkjournal.com/index.php/menu/article/view/78
8.	(Herlianti, 2022)	<i>Collaboration Of Actors in The Network in Stunting Prevention Programs in Bulukumba District</i>	Perbedaan pada hasil penelitian ini yakni masih berjalannya proses kolaborasi sehingga diperlukan lagi penelitian-penelitian mengenai <i>collaborative governance</i> dalam pencegahan <i>stunting</i> . Pada penelitian ini menjelaskan mengenai peran dan bentuk koordinasi antara beberapa pemangku kepentingan. https://www.enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/view/487
9.	(Afandi et al., 2022)	<i>A Penta-Helix Approach to Collaborative Governance of Stunting Intervention in West Java Indonesia</i>	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa komponen dari penta <i>helix</i> sudah terlibat dalam <i>collaborative governance</i> , tetapi ada faktor penghambat yakni terhambatnya partisipasi yang dinilai berdasarkan rendahnya nilai konvergensi di Kota/Kabupaten Jawa Barat. Pada implemementasi program juga belum tercapai sesuai harapan. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.15-9-2021.2315238
10.	(Uliyatul Laili, Ratna. 2019)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam	Berdasarkan hasil <i>pre test</i> dan <i>post test</i> yang diikuti oleh 35 responden dapat dinyatakan bahwa hasil <i>pre test</i> tentang tingkat pengetahuan responden mengenai program pencegahan <i>stunting</i> . Sebesar 14 responden

		Pencegahan <i>Stunting</i>	(40%) mengerti tentang program pencegahan <i>stunting</i> sedangkan berdasarkan hasil <i>post test</i> terdapat 27 responden (77,1%) yang mengerti tentang program pencegahan <i>stunting</i> . http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN_IPTEKS/article/view/2154
11.	(Kinanti Rahmadhita, 2020)	Permasalahan <i>Stunting</i> dan Pencegahannya	Penelitian ini menyebutkan bahwa prevalensi pada balita pendek selanjutnya akan dapat diperoleh dalam hasil Riskesdas 2018 yang juga menjadi sebuah tolok ukur keberhasilan program yang telah diupayakan pemerintah. Survei PSG dilakukan sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan dan capaian program. Berdasarkan hasil PSG tahun 2015, prevalensi balita pendek di Indonesia sebesar 29%. Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 27,5%. Namun, prevalensi balita pendek kembali meningkat menjadi 29,6% pada tahun 2017. Angka <i>stunting</i> diharapkan terus menurun dari waktu ke waktu sehingga semua rencana yang telah dibuat oleh pemerintah nantinya akan dapat membuahkan hasil yang baik. Dengan menurunnya prevalensi <i>stunting</i> berarti masyarakat dan pemerintah berhasil untuk melakukan intervensi yang telah dapat dilakukan secara bersama-sama. https://akper-sandikarsa.e-journal.id/JIKSH

Sumber: hasil analisis peneliti

Dari kajian pustaka yang diambil oleh peneliti dari penelitian atau referensi terdahulu yang berfokus terhadap *collaborative governance* terhadap pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Pembeda atau perbandingan dalam

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan berfokus pada *collaborative governance* yang melibatkan beberapa aktor dari mulai pihak pemerintah, swasta, masyarakat, pihak lain. Selain itu, lokasi dalam penelitian ini terdapat di Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mana masuk dalam wilayah atau kabupaten zona merah dengan fokus *stunting* di Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Kerangka Teori

1. Teori *collaborative governance*

Pemerintah pada saat ini dalam melaksanakan program ataupun pelaksanaan sebuah kebijakan menerapkan konsep *collaborative governance* sebagai faktor pendukung dalam capaian keberhasilan suatu program atau kebijakan. Kolaborasi merupakan proses kerja sama diantara beberapa pihak agar tercapainya sebuah tujuan. Selaras dengan hal tersebut, *collaborative governance* merupakan kerja sama dalam tata kelola pemerintahan dengan beberapa peran pemangku kepentingan agar dapat terlaksananya suatu tujuan. Teori *collaborative governance* merupakan sebuah penyelarasan dari satu atau lebih dari lembaga publik sebagai aktor dalam pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang bersifat formal, adanya kesepakatan dan bijaksana (Ansell & Gash, 2008).

Teori *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2008) memiliki 6 (enam) kriteria penting dalam proses kolaborasi, antara lain:

- a. Diskusi rencana kolaborasi dilakukan oleh institusi publik
- b. Partisipasi peserta kolaborasi harus mencakup non-pemerintah

- c. Partisipasi peserta harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan
- d. Forum kolaborasi dilaksanakan secara rutin
- e. Kebijakan yang dihasilkan harus berdasarkan kesepakatan bersama
- f. Kolaborasi yang dilakukan harus berfokus pada pelaksanaan kebijakan publik atau manajemen publik

Ansell dan Gash (2008) menerapkan 3 (tiga) komponen utama dalam teori *collaborative governance*, antara lain:

- a. Waktu
- b. Kepercayaan
- c. Interpedensi

Ansell dan Gash kemudian melanjutkan bahwa terdapat strategi dalam pelaksanaan kolaborasi yakni menggunakan media *platform*. Peran dari media *platform* yaitu berperan sebagai wadah pengumpulan informasi yang didapatkan dan bersifat agrerat sehingga dapat mengetahui secara lebih efektif dan efisien sebuah proses kolaborasi. Selain itu, dapat memunculkan dorongan dalam menghasilkan proses atau interaksi kolaboratif (Ansell & Gash, 2018).

Berdasarkan kriteria dan strategi di atas, dalam keberhasilan suatu kolaborasi menurut Ansell dan Gash adalah dilaksanakan suatu kolaborasi secara sistematis, dapat diawasi oleh semua partisipasi peserta, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi.

2. *Stunting*

Stunting adalah sebuah bagian dari problematika dalam kasus gizi kronis pada anak di bawah usia lima tahun yang ditandai dengan kondisi lebih pendek atau kurang tinggi dibandingkan dengan anak seusinya. *Stunting* disebabkan karena kekurangan gizi yang diterima selama dalam 1000 hari pertama di dalam kehidupan yang menyebabkan gagal tumbuh pada seorang bayi yang telah berusia 0 sampai 11 bulan dan 12 sampai 59 bulan. Faktor penyebab *stunting* lainnya adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang pemenuhan gizi yang baik sebelum hamil, selama hamil, dan setelah melahirkan; diare dan infeksi saluran pernafasan/ISPA; keterlambatan dalam memberikan air ASI; melarikan diri; kekurangan zat dari makanan hewani; dan sumber air yang tidak terjaga kebersihan atau kelayakannya (Sukanti & Faidati, 2021: 92-93).

Upaya dalam melakukan peningkatan kesehatan pada usia 1000 HPK adalah faktor yang nantinya paling dapat menentukan dalam menurunkan jumlah kasus *stunting* di Indonesia. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan *stunting*, antara lain: memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai menyentuh angka usia 6 bulan dan akan terus memberikan makanan pendamping pada ASI dalam jumlah yang cukup, serta memperhatikan kualitas ikan, dan pemantauan secara berkala tumbuh kembang balita dengan rutin membawanya ke POSYANDU, meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa tindakan yang sudah telah disebutkan di atas, terdapat tiga hal penting yang seharusnya perlu dilakukan dalam upaya untuk

menurunkan angka stunting yaitu menjaga dan memperbaiki pola makan, pola asuh, serta akses air bersih dan sanitasi (Haskas, 2020: 156).

3. Konsep *Stakeholder*

Stakeholder didefinisikan sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh program pembangunan (Hetifah, 2003). Selanjutnya (Rahim, 2012), menyatakan bahwa hakekatnya melibatkan tiga pemangku kepentingan yang saling terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Menurut Nugroho, dkk. (2014), pemangku kepentingan dalam pembangunan atau program pembangunan dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:

- a. Pencipta kebijakan: pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan.
- b. Koordinator: pemangku kepentingan yang berperan untuk mengoordinasikan pemangku kepentingan lain yang terlibat.
- c. Fasilitator: pemangku kepentingan yang membantu memfasilitasi dan memenuhi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d. Pelaksana: pemangku kepentingan pelaksana kebijakan yang meliputi kelompok sasaran.
- e. Akselerator: pemangku kepentingan yang berperan untuk mengakselerasi dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai target atau bahkan lebih cepat saat dibuat.

4. Implementasi Kebijakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2015: 65), menyatakan bahwasannya implementasi yaitu dapat memahami apa yang seharusnya telah terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau yang sedang dirumuskan. Fokus perhatian implementasi yakni kejadian dan juga kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakan sebuah kebijakan pada sebuah negara yang telah mencakup baik di dalam melakukan usaha atau upaya untuk mengadministrasikan maupun untuk dapat menimbulkan sebab akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sejalan dengan definisi tersebut, Gordon dalam Keban (2014 : 76), mendefinisikan implementasi yaitu berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi memiliki beberapa variabel untuk pengukurannya, seperti yang telah dinyatakan oleh Rondinelli dan Cheema (1983:28) di dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2015: 90), menyatakan bahwa implementasi dapat mempengaruhi empat faktor, antara lain : hubungan antar organisasi, kondisi lingkungan, sumber daya, serta karakteristik sebuah organisasi pada implementor.

5. Regulasi

Ghozali dan Chariri (2007), menyatakan bahwa para ahli teori berpendapat apabila regulasi muncul sebagai respon akibat adanya krisis yang tidak dapat diidentifikasi, dengan demikian hal yang mendorong kebijakan

regulasi muncul adalah karena adanya krisis dalam penentuan standar. Pihak penentu standar akuntansi menyediakan suatu kebijakan untuk menanggapi adanya tuntutan permintaan akan suatu kebijakan atau standar yang dimotivasi oleh krisis yang muncul. Dalam teori regulasi dijelaskan bahwa untuk melindungi kepentingan umum digunakan perekonomian yang terpusat. Teori ini menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh legislatif bertujuan untuk melindungi pengguna laporan keuangan yang dilakukan melalui peningkatan kinerja ekonomi. Regulasi dibentuk terkait beberapa kepentingan, dari beberapa kepentingan yang ada memiliki keterkaitan dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna atas suatu regulasi yang dibentuk.

1.7 Definisi Konseptual

1. *Collaborative governance* merupakan upaya dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien dengan keterlibatan para pemangku kepentingan
2. Pendekatan teori penta *helix* yang menggunakan lima komponen pemangku kepentingan sebagai inovasi dalam *collaborative governance*
3. *Stunting* adalah sebuah bagian dari masalah gizi kronis yang terjadi pada anak di bawah usia lima tahun yang dapat ditandai dengan adanya kondisi lebih pendek atau bisa dikatakan kurang tinggi dibandingkan pada anak-anak seumurannya. *Stunting* dapat mengakibatkan kondisi pada anak berupa kekurangan gizi yang diterima selama 1000 hari pertama kehidupan, yang dapat menyebabkan gagal pada tumbuh kembang pada bayi diusia 0 sampai 11 bulan dan 12 sampai 59 bulan.

1.8 Definisi Operasional

Menurut (Sugiyono, 2015), definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berikut adalah definisi operasional dari penelitian terkait bagaimana *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang kemudian akan dilihat dari indikator-indikator, diantaranya:

Tabel 2. Daftar Rincian Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Proses <i>collaborative governance</i>	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Face to face dialog</i> (dialog tatap muka)2. <i>Trust building</i> (membangun kepercayaan)3. <i>Commitment to proses</i> (komitmen terhadap proses)4. <i>Share understanding</i> (pemahaman bersama)5. <i>Intermediante outcomes</i> (hasil dari proses)
Pelayanan pencegahan dan pengendalian <i>stunting</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Penyedia program2. Penerima program3. Jenis program

Sumber: hasil analisis peneliti

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi, antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode penelitian dijabarkan secara rinci, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan penelitian ini berhubungan dengan manusia yang secara mendasar bergantung pada pengamatan. Sugiyono (2011), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan metode untuk mengidentifikasi dan pertukaran informasi ilmiah di dalam sumber penelitian yang tujuan utamanya adalah menyediakan mekanisme untuk mengaitkan sumber daya terkait tentang suatu penyelidikan ilmiah sehingga dapat dibagikan menggunakan satu pengenal. Penelitian tentang “*Collaborative Governance* dalam Pencegahan dan

Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah” ini, objek penelitiannya adalah mengenai bagaimana *collaborative governance* yang terjadi dalam pencegahan dan penanganan masalah *stunting* di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti akan melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer maupun data sekunder.

Tabel 3. Sumber Data

No	Jenis Data	Sumber
1.	Data Primer	Hasil wawancara yang terlibat dalam <i>collaborative governance</i> atau <i>stakeholder</i> dalam pencegahan dan penanganan masalah <i>stunting</i> di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
2.	Data Sekunder	Dokumen-dokumen yang diperoleh di studi pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut P. Joko Subagyo (2011), wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti dalam mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk menggali data mengenai pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Pemalang. Adapun wawancara di lakukan untuk dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang tersebar di beberapa titik instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang berada di Kabupaten Pemalang, sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DINSOSKBPP) Kabupaten Pemalang, wawancara yang akan dilakukan yakni mengkaji sebagaimana besar kontribusi dan peranan pihak pemerintah terhadap penanggulangan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Pemalang.
- 2) Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Pemalang, sebagai salah satu instansi pemerintah yang berfokus pada kesehatan di Kabupaten Pemalang. Adapun pertanyaan wawancara yang akan di ajukan meliputi kontribusi jalannya program dinas kesehatan serta bagaimana bentuk jalannya *collaborative governance* dalam penanggulangan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Pemalang.

- 3) Tim Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting (TP3S) Kabupaten Pemalang, pertanyaan yang akan diajukan, meliputi: tujuan didirikannya TP3S, program TP3S, dan bagaimana penerapan programnya.
- 4) Duta Genre Kabupaten Pemalang, sebagai salah satu pihak swasta yang ikut berperan aktif dalam penyuluhan dan lain sebagainya dalam permasalahan *stunting* di Kabupaten Pemalang. Adapun pertanyaan yang akan diajukan yakni terkait bagaimana jalannya keikutsertaan dalam penanggulangan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Pemalang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dapat berupa jurnal-jurnal, buku-buku, *website* pemerintah, ataupun aplikasi sehingga data yang didapat lebih akurat.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan jika peneliti sudah selesai dalam melakukan pengumpulan data yang didapatkan di lapangan. Menurut Moleong (2017), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data penelitian ini adalah

menggunakan teknik analisis data interaktif yang melalui beberapa langkah, antara lain:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan dalam merangkum, serta dapat memilih memilah atas hal-hal utama, dan yang telah memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari sebuah tema dan juga polanya yang bisa berkaitan dengan masalah pada topik penelitian, kemudian dikelompokkan sesuai dengan topik masalah.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah perkumpulan informasi secara tersusun yang memungkinkan untuk dapat dilakukan sebuah penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Agar dapat melihat dari gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian maka data yang diperoleh dapat disajikan dalam uraian, *network*, *chart* atau grafik, dan lain sebagainya.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupa hasil penelitian sebagai jawaban dari sebuah fokus penelitian yang berdasarkan atas hasil analisis data-data yang sudah disusun. Penyajian kesimpulan merupakan bentuk deskriptif objek yang telah diteliti dengan berpedoman pada atas kajian dari penelitian.